

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGGUNAKAN
RASIO KEUANGAN DAERAH TAHUN 2023-2025

Nur Fania Hilda Prima Anggraini, Eigis Yani Pramularso

Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana
InformatikaEmail: nurfaniahildaa@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan rasio keuangan daerah tahun 2023-2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi pustaka menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Analisis dilakukan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada pendapatan transfer. Rasio efektivitas tergolong sangat efektif karena realisasi Pendapatan Asli Daerah mampu melampaui target yang ditetapkan. Rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien pada tahun 2023 dan kurang efisien pada tahun 2024-2025. Sementara itu, rasio aktivitas menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan agar sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah dapat digunakan secara tepat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan daerah perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan data keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Saputra & Priyastiwi, 2026).

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk

menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja serta menjadi dasar dalam mengevaluasi kondisi keuangan daerah (Maylani & Siswanto, 2022).

Salah satu indikator dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer. Semakin tinggi tingkat kemandirian menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dengan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Sebaliknya, tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Kondisi kemandirian keuangan yang rendah masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Hapsari et al., 2025).

Selain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi juga digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui pencapaian target pendapatan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan penggunaan anggaran secara efisien. Hasil penelitian Sukmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat berada pada kategori efektif, sedangkan tingkat kemandirian masih perlu ditingkatkan.

Rasio aktivitas juga menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pola alokasi belanja daerah. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui proporsi penggunaan belanja daerah, khususnya antara belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berkaitan dengan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal berkaitan dengan pengeluaran untuk memperoleh atau membangun aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Perbandingan kedua jenis belanja tersebut dapat memberikan gambaran mengenai prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis rasio aktivitas diperlukan untuk melengkapi penilaian terhadap kinerja keuangan daerah secara menyeluruh (Cendra, 2025).

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data LRA Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat digunakan untuk menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah melalui berbagai rasio keuangan. Berdasarkan data yang tersedia, struktur pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer yang menjadi bagian penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta pola alokasi belanja daerah selama periode penelitian.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penelitian Utari et al. (2023) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Barat" menunjukkan bahwa tingkat

kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi, sedangkan rasio efektivitas berada pada kategori efektif meskipun mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dan efektivitas keuangan daerah dapat memiliki kondisi yang berbeda dalam satu objek penelitian.

Selanjutnya, penelitian Sukmawati et al. (2025) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi" menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berada pada kategori cukup baik. Rasio efektivitas tergolong efektif, sedangkan rasio kemandirian masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian efektivitas pendapatan belum secara langsung menunjukkan tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian lainnya, yaitu Praditya & Yusuf (2025) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan", menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif, sedangkan rasio kemandirian masih rendah sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, Setyabudi et al. (2025) dalam penelitian yang berjudul "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati" menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah tergolong baik, tetapi rasio kemandirian masih rendah sehingga diperlukan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa analisis rasio keuangan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi hasilnya dapat berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak hanya dapat dilihat dari satu indikator, karena suatu daerah dapat memiliki efektivitas pendapatan yang baik tetapi tingkat kemandirian yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menggunakan beberapa rasio secara bersamaan agar kondisi kinerja keuangan daerah dapat digambarkan secara lebih menyeluruh.

Meskipun penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2025 dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas masih perlu dilakukan. Perbedaan karakteristik keuangan dan kondisi masing-masing pemerintah daerah menyebabkan hasil penelitian pada daerah lain belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data keuangan pada periode 2023-2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dalam menambah kajian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2023-2025."

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mengetahui pola alokasi belanja berdasarkan

rasio aktivitas, serta menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan tahun 2023-2025.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Keuangan Daerah

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Halim, (2019) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut (Pakaya et al., 2025), keuangan daerah merupakan seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut (Maylani & Siswanto, 2022), keuangan daerah adalah instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan pengertian di atas, maka keuangan daerah dapat diartikan sebagai seluruh hak, kewajiban, serta sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Keuangan Daerah

Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi, (2019) kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut (Elis & Munandar, 2023), kinerja keuangan daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Menurut (Praditya & Yusuf, 2025), kinerja keuangan daerah menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis-Jenis Rasio

Rasio kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Hery (2021), mengatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah membiayai sendiri operasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat melalui PAD. Rasio ini menunjukkan seberapa bergantung

pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Nilai rasio kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Ini karena daerah lebih mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pihak lain. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi dikalikan seratus persen, yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD. Rumus ini adalah sebagai berikut :

Rasio Kemandirian :

Tabel II. 1

Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Daerah

Sumber : (Buku Hery, 2021)

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat efektivitas pemerintah daerah sebanding dengan kemampuan mereka untuk mencapai target penerimaan daerah. Rasio ini juga menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan pendapatannya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Rumus Rasio Efektivitas:

Rasio Efektivitas :

Tabel II. 2

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : (Buku Mahmudi, 2019)

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), rasio efisiensi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan optimal untuk memperoleh pendapatan daerah. Rasio ini membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah yang diperoleh selama periode anggaran tertentu. Nilai rasio efisiensi yang lebih rendah menunjukkan seberapa efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena pemerintah daerah memiliki kemampuan. Karena alasan ini, sangat penting untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola anggaran mereka secara efisien sehingga tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara maksimal.

Rumus Rasio Efisiensi:

Rasio Efisiensi :

Tabel II. 3

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : (Buku Mardiasmo, 2018)

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2016), menyatakan bahwa rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan anggaran daerah untuk belanja operasional dan modal. Tujuan rasio aktivitas adalah untuk mengetahui berapa banyak dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana. Rasio aktivitas dapat digunakan untuk menilai keseimbangan alokasi belanja daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ini karena rasio ini dapat menunjukkan apakah pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada kegiatan pelayanan rutin atau pembangunan jangka panjang.

Rumus Rasio Aktivitas :

Rasio Aktivitas Belanja Operasi

Rasio Aktivitas Belanja Operasi :

Rasio Aktivitas Belanja Modal

Rasio Aktivitas Belanja Modal :

Tabel II. 4

Kriteria Aktivitas Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Buku (Nordiawan, 2016)

Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Dengan menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja keuangan daerah diukur untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan mereka secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mengelola APBD (Harahap, 2024).

Adapun tujuan kinerja keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah: Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan dan belanja daerah secara efektif untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah:

Kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai apakah penggunaan anggaran daerah telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menilai tingkat kemandirian keuangan daerah :

Pengukuran kinerja keuangan daerah digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Sebagai alat evaluasi pelaksanaan APBD :

Kinerja keuangan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD agar pemerintah daerah dapat memperbaiki pengelolaan keuangan pada periode berikutnya.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai landasan dalam mendukung penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu, penulis memperoleh gambaran mengenai metode, variabel, hasil penelitian, serta temuan yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan daerah. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan kebaruan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel II. 5

Penelitian Relevan

Sumber : (diolah penulis, 2026)

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Kemudian, data laporan keuangan tersebut dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yang terdiri dari rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas. Analisis rasio digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan efisien, serta untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara yang optimal (Setyabudi et al., 2025).

Selanjutnya, hasil analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Karena data yang digunakan berupa angka dari laporan keuangan yang dianalisis menggunakan rumus rasio keuangan tanpa melakukan pengujian statistik inferensial, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif non statistik. Dinilai bahwa metode ini dapat memberikan gambaran objektif dan sistematis tentang keadaan keuangan daerah (Juliansyah & Insaniyah, 2023).

Sumber : (diolah penulis, 2026)

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Ghefira et al., 2023), desain penelitian merupakan kerangka penelitian yang digunakan untuk mengatur proses pengumpulan dan analisis data sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan menggunakan rasio keuangan daerah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan laporan keuangan pemerintah dari BKAD Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk menganalisis data ini.

Dalam analisis rasio keuangan daerah, empat rasio digunakan: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Rasio kemandirian menilai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri melalui PAD.

Rasio efektivitas menilai kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan daerah; dan rasio efisiensi menilai seberapa efisien pemerintah daerah menggunakan PAD. Hasil analisis juga berfungsi sebagai dasar untuk membuat kesimpulan tentang tingkat kinerja keuangan daerah.

Sumber : (BKAD Kabupaten Gunungkidul, diakses tahun 2025)

Gambar III. 1 Desain Penelitian

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki fitur tertentu dan menjadi fokus penelitian. Namun, sebagian dari populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi penelitian disebut sampel. Penentuan populasi dan sampel dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Seperti yang dinyatakan oleh (Asrulla et al., 2023) Sebaliknya, sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili penelitian.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dipublikasikan melalui website resmi BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Tabel III. 1

Populasi Penelitian

Sumber : (BKAD Kabupaten Gunungkidul, diakses tahun 2026)

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023-2025. LRA dipilih karena memuat informasi mengenai

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, dan total belanja yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. (Sugiyono, 2022)

Sampel Penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: Laporan keuangan Kabupaten Gunungkidul dapat diakses secara lengkap di situs web resmi pemerintah. Laporan keuangan ini berisi informasi yang diperlukan untuk menentukan rasio keuangan daerah. Laporan keuangan ini merupakan data terbaru yang dipublikasikan secara resmi.

Tabel III. 2

Sampel Penelitian

Sumber : (BKAD Kabupaten Gunungkidul, diakses tahun 2026)

Sampel penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023-2025. LRA dipilih karena memuat data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja daerah, dan belanja modal yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah deskripsi variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis variabel. Menurut Sugiyono (2022), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk mendapatkan informasi tentangnya dan kemudian membuat kesimpulan.

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang diukur dengan rasio keuangan daerah, adalah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, efisien, dan berkelanjutan, sejumlah indikator rasio keuangan digunakan.

Tabel III. 3

Definisi Operasional Variabel

Sumber : (Mahmudi, 2019)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2022), teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diperoleh melalui website resmi BKAD Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025 digunakan sebagai sumber data untuk melakukan perhitungan rasio keuangan daerah dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan ditarik kesimpulan. Sugiyono (2022).

Adapun rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus rasio kemandirian:

$$\text{PAD} \div \text{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Tabel III. 4

Kriteria Penelitian Rasio Mandiri

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus rasio efektivitas :

$$\text{Realisasi PAD} \div \text{Target PAD} \times 100\%$$

Tabel III. 5

Kriteria Penelitian Rasio Efektivitas

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Rumus rasio efisiensi:

$$\text{Realisasi Belanja} \div \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

Tabel III. 6

Kriteria Penelitian Rasio Efisiensi

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui prioritas alokasi belanja daerah terhadap pembangunan daerah.

Rumus Rasio aktivitas:

$$\text{Belanja Modal} \div \text{Total Belanja Daerah} \times 100\%$$

Interpretasi rasio aktivitas dilakukan dengan melihat besarnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi nilai rasio aktivitas menunjukkan semakin besar perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 sampai dengan 2025. Data tersebut diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul dan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan rasio keuangan daerah yang terdiri atas rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas.

Sebelum dilakukan perhitungan rasio keuangan, terlebih dahulu disajikan data pokok yang digunakan dalam penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Total Belanja Daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data PAD digunakan untuk menghitung rasio kemandirian dan rasio efektivitas.

Tabel IV. 1

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Sumber: LRA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Berdasarkan Tabel 4.1.1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul selama periode 2023-2025 mengalami perubahan setiap tahunnya. Target dan realisasi PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio efektivitas dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025, diketahui bahwa realisasi PAD mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023, realisasi PAD sebesar Rp277.318.850.589,86, kemudian meningkat menjadi Rp301.193.377.089,18 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut sebesar Rp23.874.526.499,32 atau 8,61% dibandingkan tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi PAD kembali meningkat menjadi Rp303.274.173.192,56, atau meningkat sebesar Rp2.080.796.103,38 atau 0,69% dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama periode 2023-2025 menunjukkan tren meningkat, dengan total peningkatan sebesar Rp25.955.322.602,70 atau 9,36% dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Meskipun demikian, peningkatan realisasi PAD pada tahun 2025 relatif lebih kecil dibandingkan peningkatan pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan selama periode penelitian, namun laju peningkatannya mengalami perlambatan pada tahun 2025.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai bentuk dukungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel IV. 2 Pendapatan Transfer

Tahun 2023-2025

Sumber: LRA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Besarnya nilai pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memperoleh dukungan pendanaan yang cukup besar dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

4.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Dalam penelitian ini belanja daerah dibedakan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Tabel IV. 3 Data Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Sumber: LRA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, data belanja daerah yang digunakan terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan total belanja. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio efisiensi dan rasio aktivitas.

Berdasarkan Tabel 4.1.3 dapat diketahui bahwa belanja daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama periode 2023-2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Data belanja daerah tersebut menjadi dasar dalam menghitung rasio efisiensi dan rasio aktivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan anggaran daerah selama periode penelitian.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Subbab 4.1, selanjutnya dilakukan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Analisis dilakukan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023-2025. Hasil perhitungan setiap rasio disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama periode penelitian.

4.2.1 Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer.

Rumus :

Rasio Kemandirian : $\times 100\%$

Tabel IV. 4

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Sumber : (Data Diolah, penulis 2026)

Berdasarkan Tabel 4.2.1, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 sebesar 16,23%, kemudian meningkat menjadi 16,62% pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 17,68% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan transfer selama periode penelitian. Meskipun demikian, seluruh nilai rasio masih berada pada kategori sangat rendah, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membiayai kebutuhan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah masih terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pendapatan transfer sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah untuk membiayai operasi pemerintahan. Akibatnya, pemerintah daerah tetap bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, rasio kemandirian yang meningkat setiap tahun menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan kedua, yang berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri masih perlu ditingkatkan karena tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah selama periode 2023-2025.

Menurut penelitian (Utari et al., 2023), pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat karena mereka belum memiliki tingkat kemandirian keuangan yang cukup tinggi.

Praditya dan Yusuf (2025), juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena rasio kemandirian keuangan mereka masih rendah.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer, pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan di masa depan, pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus terus berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rumus:

Belanja Efektivitas : $\times 100\%$

Tabel IV. 5

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Sumber : (Data Diolah Penulis, 2026)

Menurut data yang ditunjukkan dalam tabel, rasio efektivitas keuangan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 adalah 103,77% (realisasi PAD sebesar Rp277.318.850.589,86 dari target Rp267.240.187.152,00). Pada tahun 2024, persentase efektivitas kembali stabil pada 103,53%, dan pada tahun 2025, persentase efektivitas kembali stabil pada 100,96%, dengan realisasi nominal PAD meningkat menjadi Rp303.274.173.192,56.

Secara keseluruhan, tren pergerakan rasio ini menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik karena nilainya selalu berhasil menembus pagu anggaran lebih dari seratus persen. Akibatnya, kinerja pengelolaan pendapatan daerah diklasifikasikan sebagai sangat efektif. Tren penurunan tipis persentase dari tahun 2023 ke tahun 2025 tidak menunjukkan penurunan produktivitas fiskal. Sebaliknya, itu menunjukkan betapa tepatnya tim anggaran daerah merencanakan target PAD yang semakin rasional, terukur, dan dekat dengan potensi riil di lapangan.

Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan tentang seberapa efektif keuangan daerah. Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah dilakukan dengan baik. Ini berarti bahwa pemerintah daerah telah mencapai target penerimaan yang sudah direncanakan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membuat target Pendapatan Asli Daerah yang realistis dan bisa memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah.

(Utari et al., 2023), menjelaskan bahwa rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Praditya & Yusuf (2025), Mereka menyatakan bahwa rasio efektivitas menunjukkan seberapa berhasil pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Jadi, rasio efektivitas yang tinggi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan dengan baik selama penelitian.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berfungsi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran belanja daerah guna merealisasikan perolehan total pendapatan daerah.

Rumus :

Rasio Efisiensi : $\times 100\%$

Tabel IV. 6

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Sumber : (Data Diolah, Penulis 2026)

Merujuk pada hasil pengolahan data Tabel IV.6, nilai rasio efisiensi keuangan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 100,44% akibat porsi realisasi belanja yang melebihi perolehan pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2024 rasio ini menunjukkan tren membaik (menurun) menjadi 98,96%, dan kembali menurun menjadi 97,73% pada tahun 2025. Tren penurunan persentase rasio ini mencerminkan adanya peningkatan kontrol pengendalian belanja daerah yang lebih berimbang terhadap realisasi kas pendapatan. Meskipun demikian, ruang penghematan atau sisa anggaran daerah dinilai tipis karena rasio penyerapan belanja terus bertahan mendekati pagu penuh 100%.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban tentang tingkat efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran daerah masih cukup tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Artinya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu meningkatkan efisiensi dalam mengelola belanja daerah. Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat memberikan hasil yang lebih baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

(Setyabudi et al., 2025), menjelaskan bahwa rasio efisiensi adalah indikator untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja terhadap pendapatan daerah. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Elis dan Munandar (2023), juga menyatakan bahwa efisiensi penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan. Tujuannya, agar pengeluaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah meningkatkan efisiensi selama periode 2023-2025. Namun, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian belanja. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efisien.

4.2.2 Pola Alokasi Belanja Daerah Berdasarkan Rasio Aktivitas Tahun 2023-2025

Rasio Aktivitas Belanja Operasi Tahun 2023-2025

Rasio Aktivitas Belanja Operasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi anggaran belanja daerah yang dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan rutin operasional pemerintahan yang habis dalam satu tahun anggaran, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan.

Rumus :

Belanja Operasi : $\times 100\%$

Tabel IV. 7

Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Operasi Tahun 2023-2025

Sumber : (Data Diolah, Penulis 2026)

Rasio aktivitas Belanja Operasi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 adalah 72,96%, dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.459.831.749.104,10 dari total belanja Rp2.000.900.739.750,10, menurut data yang disajikan dalam Tabel IV. 6. Dalam dua tahun

berikutnya, rasio ini mengalami tren naik yang konsisten; pada tahun 2024, naik sebesar 4,38% menjadi 77,34%, dan pada tahun 2025, naik sebesar 0,22% menjadi 77,56%.

Secara keseluruhan, alokasi pengeluaran daerah dimasukkan ke dalam kategori Dominan Operasional karena fakta bahwa angka rasio selalu melebihi ambang batas 70%. Tren yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa struktur anggaran fiskal daerah masih berfokus pada pemenuhan belanja konsumtif internal aparatur pemerintahan. Hal ini secara signifikan membatasi kemampuan pembiayaan untuk investasi publik jangka panjang melalui Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana pola alokasi belanja daerah berdasarkan rasio aktivitas. Meskipun belanja modal mempunyai proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi, pengalokasian anggaran ini tetap sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menyediakan infrastruktur yang bermanfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan alokasi belanja modal sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Maylani dan Siswanto (2022), menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, sehingga kondisi kinerja keuangan dapat dinilai secara menyeluruh. Dengan menggunakan rasio aktivitas, pemerintah daerah dapat mengetahui prioritas penggunaan anggaran antara belanja operasional dan belanja yang bersifat investasi.

Selain itu, (Pakaya et al., 2025) menjelaskan bahwa rasio aktivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja secara efektif dan berkelanjutan. Sejalan dengan pendapat tersebut, proporsi belanja modal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan melalui penyediaan aset dan infrastruktur. Namun demikian, alokasi belanja modal tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Rasio Aktivitas Belanja Modal Tahun 2023-2025

Rasio Aktivitas Belanja Modal digunakan untuk mengukur porsi alokasi anggaran daerah yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah ke dalam aset tetap publik (seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan jaringan sarana infrastruktur fisik lainnya) yang memiliki masa manfaat jangka panjang bagi pelayanan masyarakat.

Rumus :

Belanja Modal : $\times 100\%$

Tabel IV. 8

Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal Tahun 2023-2025

Sumber : (Data Diolah, Penulis 2026)

Rasio aktivitas belanja modal Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 adalah 8,89%, dengan realisasi belanja modal sebesar Rp177.916.134.671,00 dari total belanja sebesar

Rp2.000.900.739.750,10. Dalam dua tahun anggaran berikutnya, rasio ini menunjukkan tren penurunan terus menerus; pada tahun 2024, nilainya turun sebesar 2,07% menjadi 6,82%, dan pada tahun 2025, nilainya kembali turun sebesar 1,02% menjadi hanya 5,82%.

Secara keseluruhan, kinerja alokasi ini dianggap kurang efektif atau kurang proporsional karena tren penurunan persentase yang terus-menerus di bawah ambang batas ideal belanja publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa, dari tahun ke tahun, ruang fiskal untuk pembangunan fisik semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembiayaan kas daerah masih diserap secara besar-besaran ke pos Belanja Operasi Rutin Internal Pemerintahan.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban tentang pola alokasi belanja daerah berdasarkan rasio aktivitas. Walaupun proporsi belanja modal relatif lebih rendah, pengalokasian anggaran ini tetap berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pasalnya, belanja modal dapat menghasilkan aset yang dapat digunakan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan alokasi belanja modal. Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik.

Maylani dan Siswanto (2022), menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja. Dengan begitu, kondisi kinerja keuangan daerah dapat dinilai secara keseluruhan. Rasio aktivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan. Rasio ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menentukan prioritas penggunaan anggaran.

(Pakaya et al., 2025), menjelaskan bahwa rasio aktivitas digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja secara efektif dan berkelanjutan. Proporsi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan melalui penyediaan aset dan infrastruktur.

Namun, alokasi belanja modal perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Tujuannya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

4.2.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rasio keuangan daerah yang terdiri atas rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Keempat rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023-2025.

Berikut rekapitulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2023-2025:

Tabel IV. 9

Rekapitulasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Rasio Keuangan Daerah Tahun 2023-2025

Sumber: Data Diolah, Penulis (2026)

Berdasarkan hasil analisis, rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2023-2025 berada pada kategori sangat rendah sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi menunjukkan kondisi belum efisien secara optimal meskipun mengalami perbaikan pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, rasio aktivitas menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa indikator yang telah menunjukkan hasil baik, khususnya pada rasio efektivitas. Namun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, demikian pula efisiensi penggunaan anggaran dan keseimbangan alokasi belanja daerah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai masing-masing rasio keuangan daerah diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio

Rasio	2023	2024	2025	Rata-rata	Kriteria
Kemandirian	16,23%	16,62%	17,68%	16,84%	Sangat rendah
Efektivitas	103,77%	103,53%	100,96%	102,75%	Sangat efektif
Efisiensi	100,44%	98,96%	97,73%	99,04%	Kurang efisien
Aktivitas operasi	72,96%	77,34%	77,56%	75,95%	Dominan operasional
Aktivitas modal	8,89%	6,82%	5,80%	7,17%	Kurang efektif

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023-2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pola alokasi belanja daerah berdasarkan rasio aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal selama periode 2023-2025. Tingginya proporsi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, proporsi belanja modal masih relatif lebih rendah, sehingga pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan alokasi belanja agar pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tingkat kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil yang berbeda pada setiap indikator. Rasio kemandirian selama tahun 2023-2025 berada pada kategori sangat rendah, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer. Rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien pada tahun 2023 dan mengalami perbaikan menjadi kurang efisien pada tahun 2024 dan 2025, sehingga pengelolaan belanja daerah masih perlu dioptimalkan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan analisis rasio keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada pada kategori sangat efektif, sedangkan rasio kemandirian masih berada pada kategori sangat rendah. Selain itu, rasio efisiensi menunjukkan kondisi belum efisien secara optimal, sementara rasio aktivitas menggambarkan bahwa alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal.

5.2 Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat berkurang. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta menjaga keseimbangan antara alokasi belanja operasi dan belanja modal agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pembangunan daerah.

Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta menambahkan rasio keuangan daerah lainnya atau variabel pendukung yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan perbandingan dengan pemerintah daerah lain sehingga hasil analisis menjadi lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Riyans Ardiansyah Universitas Borneo Tarakan , Indonesia 1 . Pendahuluan Undang-undang no . 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa daerah diberik. Universitas Borneo Tarakan, Indonesia, 4(1), 92-106.
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26320-26332.
- Cendra. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023. Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), 11(2), 167-176.
- Elis, & Munandar, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 - 2021. Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi - Vol. 15. No. 1 (2023), 15(1), 1-7.
- Ghefira, I., Paramita, D., Oktasyawitri, E. S., Damayanti, P., Syarifuddin, & Pahlevi, M. R. (2023). Desain E-LKPD Berbasis Project Based Learning Melalui Platform LiveWorksheet Terhadap Pembelajaran Sejarah Secara Hybrid Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 20 (2), 2023, 20(2), 54-61.
- Halim, A. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi 4). UPP STIM YKPN.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran License. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(2), 154-164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Harahap, H. F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ekonomipedia Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 2(1), 179-190. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia>
- Hery. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo.
- Juliansyah, E., & Insaniyah, M. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut). Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, 05(01), 1-16.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (4th ed.). Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maylani, D. A., & Siswanto. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 11(1), 130-138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Nordiawan, D. (2016). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

- Pakaya, S. N., Monoarfa, R., & Wuryandini, A. R. (2025). Analisis Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019-2023. *Jurnal Buana Akuntansi*, 10(01), 46-69.
- Praditya, R. A., & Yusuf, A. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023 Analysis of the Financial Performance of the Balikpapan City Regional Government in 2018-2023. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 45-54.
- Saputra, M. S., & Priyastiwi. (2026). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha , Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 14(1), 39-43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.13325>
- Setyabudi, T. G., Iswara, U. S., Susanti, & Widyawati, D. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*, 36(3), 255-262.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2, C). Alfabeta.
- Sukmawati, A., Murnidayanti, S. A., Dahlia, & Permana, K. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2021-2023. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1832-1841.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26840>
- Utari, R., Nursyabani, A., In, H., Rizka, R. B., & Kurniawan, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eko-Bisma*, 2(2), 204-211.